

Cita Ekonomika

JURNAL EKONOMI

Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Perbatasan Kabupaten Merauke
Fenty J. Manuhutu

Pengembangan Model Pengukuran Disparitas Pembangunan Antar Wilayah Berbasis Multidimensi di Provinsi Maluku
Amaluddin

Pengaruh Atribut Kartu AS Telkomsel Terhadap Loyalitas Pelanggan di Kota Ambon
Angrani Chaniago

***Financial Literacy* Berdasarkan Jenis Kelamin (Studi Empiris Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi UKIM)**
Micrets Agustina Silaya

Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Maluku
Terezia V. Pattimahu

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Periode 2008 - 2014
Muhammad Ratmasa Serang

Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Semangat Kerja Pegawai BAPPEDA Provinsi Maluku
Pieter N. R. Rehatta

Pengaruh Investasi Pemerintah, Konsumsi Pemerintah, Pajak dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku (Panel Data Analisis: Studi pada 11 Kabupaten/Kota)
Teddy Christianto Leasiwal

Pengaruh Spiritualitas di Tempat Kerja, Umur, Lamanya Bekerja dan Pendapatan per bulan Terhadap Motivasi Manajemen Laba
Dwi Kriswantini

Pengaruh Stres Kerja Terhadap Komitmen Organisasi yang Dimoderasi Oleh *Locus of Control* pada Rumah Sakit Swasta di Kota Ambon
Saleh Tutupoho

Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi (Studi Kasus Kabupaten Maluku Tenggara Barat)
Elsjamina M. Latuny

Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)
Ummi Duwila

CE	Vol. X	No. 1	Halaman 1 - 109	Ambon Mei 2016	ISSN 1978-3612
----	--------	-------	--------------------	-------------------	-------------------

ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI (Studi Kasus Kabupaten Maluku Tenggara Barat)

Elsjamina M. Latuny

Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka – Ambon
nona.latunys@mail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari pelaksanaan otonomi daerah terhadap perkembangan kemampuan keuangan pemerintah daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat dari tahun 2008 – 2014. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Indeks Kemampuan Rutin, Ketergantungan Fiskal.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah otonomi daerah belum berhasil memberikan kontribusi yang baik/positif terhadap perkembangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan nilai derajat desentralisasi fiskal, Indeks Kemampuan Rutin sangat rendah dan tingkat ketergantungan yang sangat besar/tinggi.

Kata Kunci: Otonomi daerah, derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, ketergantungan fiskal

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah untuk merespons tuntutan masyarakat daerah. kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional.

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pamudji (1982), menyatakan bahwa keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah dimaksud dalam arti sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan atau subsidi pemerintah pusat (Kaho, 1997), oleh karena itu kalau daerah tidak mempunyai sumber-sumber keuangan

yang cukup, akibatnya akan tergantung terus kepada pemerintah pusat (Prabowo, 1999).

Salah satu faktor utama penentu suatu daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahnya sendiri dengan meminimalisir tingkat ketergantungan kepada transfer dana pemerintah pusat dan mempunyai proporsi transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Pada lampiran disajikan data laporan realisasi penerimaan dan belanja pemerintah kabupaten Maluku Tenggara.

Terlihat bahwa peningkatan pembiayaan di Kabupaten Maluku Tenggara akibat dari pemerintah

ingin meningkatkan pertumbuhannya. Hal ini dapat berjalan karena adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh daerah lewat penerimaan asli daerah maupun transfer pemerintah pusat, sehingga penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh pelaksanaan otonomi daerah terhadap kemampuan keuangan daerah kabupaten Maluku Tenggara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *outus* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5. "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan." (Undang-Undang Otonomi Daerah 2004: 4). Yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Berdasarkan ide hakiki yang terkandung dalam konsep otonomi, maka Sarundajang (2002) juga menegaskan tujuan pemberian otonomi kepada daerah meliputi 4 aspek sebagai berikut :

- (1) Dari segi politik adalah mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional;
- (2) Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan;
- (3) Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk mandiri;
- (4) Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat;

Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Pasal 1 butir 5 PP No.58 Tahun 2005).

Berdasarkan desentralisasi fiskal Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) sumber – sumber penerimaan daerah terbagi atas:

- a. Sisa anggaran tahun lalu.
- b. Pendapatan Asli Daerah .
- c. Dana perimbangan.
- d. Sumbangan dan bantuan.
- e. Penerimaan pembangunan.

Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi Fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat. Tim Fisipol UGM dan Balitbang depdagri menentukan skala interval derajat desentralisasi fiskal untuk menentukan klasifikasi daerah sesuai dengan derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah	
%	Kemampuan Keuangan
00,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01- 20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sangat Cukup
40,01-50,00	Baik

Pola Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Menurut Thoha (1991: 167), kemampuan daerah dari segi keuangan dapat dibuatkan pedoman prosedurnya dengan mengkaitkan pada penerapan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pola hubungan tersebut dikaitkan dengan kemampuan daerah dapat dibagi menjadi empat pola hubungan, yaitu:

Tabel 2.

Pola Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Kemampuan		Pola Hubungan
Keuangan	%	
Sangat rendah	0 – 25	Instruktif
Rendah	26 – 50	Konsultatif
Sedang	51 – 75	Partisipatif
Tinggi	76 – 100	Delegatif

Menurut Reksohadiprojo (1999: 3) dan Thoha (1991: 167), pola hubungan antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah dilihat dari derajat otonomi fiskal dengan mengadopsi dari teori Paul Harsey dan Kenneth Blanchard dapat dibedakan menjadi empat macam klasifikasi.

1. *Pola hubungan instruktif*, di mana pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahannya dan petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandiriannya sangat kurang. Daerah ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang tidak mampu atau kurang mampu melaksanakan urusan otonominya.
2. *Pola hubungan konsultatif*, pengarahannya dan campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah daerah mulai meningkat. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang sedikit mampu untuk melaksanakan urusan otonominya.
3. *Pola hubungan partisipatif*, pengarahannya dari pemerintah pusat semakin berkurang mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya.
4. *Pola hubungan delegatif*, pemerintah pusat sangat mengurangi atau meniadakan campur tangan dalam mengurus urusan otonomi, karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu mandiri. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang mampu melaksanakan urusan otonominya.

Indeks Kemampuan Rutin

Indeks kemampuan rutin adalah suatu ukuran yang menggambarkan sejauhmana pendapatan asli daerah dapat membiayai belanja rutin. Indeks kemampuan rutin dapat dilihat melalui proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat. Menurut Tumilar, Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dapat dinilai dengan skala pada tabel 3.

Tabel 3.

Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin

%	Kemampuan Keuangan
00,00 - 20,00	Sangat Kurang
20,01 - 40,00	Kurang
40,01 - 60,00	Cukup
60,01 - 80,00	Baik
80,01 - 100	Sangat Baik

Ketergantungan Fiskal

Masalah yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan terhadap transfer dana dari

pemerintah pusat dalam hal ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah (Kuncoro, 2004).

Berikut ini skala yang dipakai dalam menentukan ketergantungan fiskal adalah:

Tabel 4.
Skala Ketergantungan Fiskal

Ketergantungan Fiskal	%
Sangat rendah	0 – 25
Rendah	26 – 50
Sedang	51 – 75
Tinggi	76 – 100

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Analisis

Menurut Halim (2004), dalam mengukur kinerja keuangan daerah dan mengukur tingkat kemandirian daerah dapat dihitung dengan rumus-rumus rasio keuangan daerah, yaitu :

(a) Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat.

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$DDF = \frac{\sum PAD}{\sum Total\ Penerimaan} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
PAD = Pendapatan Asli Daerah

(b). Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal daerah (KFD) atau disebut juga tingkat pelayanan publik per kapita (PPP) adalah kebutuhan pendanaan untuk pelayanan umum. Dapat diukur dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$KFD = \frac{TBD}{Penduduk}$$

Dimana :

TBD = Total Pengeluaran Daerah

(c). Indeks Kemampuan Rutin

Indeks kemampuan rutin adalah suatu ukuran yang dipakai untuk mengetahui sejauhmana kemampuan pendapatan asli daerah dapat membiayai belanja rutin daerah tersebut. Untuk mengetahui indeks kemampuan rutin dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKR = \frac{PAD}{Belanja\ Rutin}$$

(d). Ketergantungan Fiskal

Tingkat ketergantungan fiskal adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui ketergantungan daerah (fiskal) terhadap dana bantuan pusat (Kuncoro, 1995: 12). Untuk mengukur tingkat ketergantungan fiskal daerah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$Ketergantungan = \frac{\sum \text{Dana Perimbangan}}{\sum \text{Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah mencerminkan berhasil atau tidaknya suatu daerah dalam menjalankan otonomi di daerahnya. Jika kemampuan keuangan daerahnya sangat baik maka pelaksanaan otonomi di daerah tersebut berhasil dilaksanakan. Sebaliknya apabila ketergantungan fiskalnya sangat tinggi maka daerah tersebut kurang berhasil dalam melaksanakan otonomi di daerahnya. Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan menghitung derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, indeks kemampuan rutin, dan ketergantungan fiskal.

Derajat Desentralisasi Fiskal Maluku Tenggara Barat

Derajat desentralisasi fiskal merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan seberapa besar kemampuan daerah dapat membiayai sendiri pengeluaran daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat dalam hal keuangan. Sumber pembiayaan yang dimaksud berasal dari pendapatan asli daerah. Kemandirian daerah juga dapat diketahui dengan membandingkan derajat desentralisasi fiskal suatu daerah dari tahun ke tahun. Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskalnya, maka daerah tersebut telah berhasil dalam menjalankan otonomi di daerahnya.

Berikut ini disajikan data derajat desentralisasi Kabupaten Maluku Tenggara selama tujuh tahun, yakni:

Tabel 5.

Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 2008-2014
(dalam persen)

Tahun	DDF	Kemampuan Keuangan Daerah
-------	-----	---------------------------

2008	4,15	Sangat Kurang
2009	3,18	Sangat Kurang
2010	3,34	Sangat Kurang
2011	2,66	Sangat Kurang
2012	5,97	Sangat Kurang
2013	3,56	Sangat Kurang
2014	3,11	Sangat Kurang
Rata - rata	3,71	Sangat Kurang

Sumber: data diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Maluku Tenggara Barat berfluktuatif. Pada tahun 2008 -2011 terus menurun dari 4,15 % hingga 2,66 %. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari 2,66 % menjadi 5,97 %. Namun derajat desentralisasi fiskal kembali mengalami penurunan pada tahun 2013 dari 5,97 % menjadi 3,56 % dan terus menurun hingga tahun 2014 menjadi 3,11 %.

Menurut Tim Fisipol UGM dalam menentukan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah yang berkemampuan keuangan yang *sangat kurang* yaitu dengan rata - rata derajat desentralisasi fiskalnya sebesar 4,71 % dan kabupaten Maluku Tenggara Barat termasuk dalam katagori daerah yang berkemampuan keuangan yang sangat kurang.

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari tahun ke tahun sangat kurang. Ini mencerminkan bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kurang mampu / belum berhasil dalam meningkatkan kemandirian fiskal di daerahnya sendiri dan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat belum memanfaatkan sumber - sumber penerimaan asli daerahnya secara optimal. Rendahnya kemandirian fiskal (yang diukur dengan derajat desentralisasi fiskal) menggambarkan tingginya ketergantungan fiskal.

Kebutuhan Fiskal Maluku Tenggara Barat

Kebutuhan fiskal menurut Sirait (2009), adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam perhitungan DAU, kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan untuk membiayai pengeluaran penduduk suatu daerah.

Untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan fiskal maka dapat dilakukan perbandingan antara total belanja daerah dengan total penduduk suatu daerah. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6.
Kebutuhan Fiskal Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 2008 - 2014
(dalam persen)

Tahun	KFD
2008	87,58
2009	21,18
2010	29,10
2011	35,45
2012	31,41
2013	44,31
2014	55,10
Rata-rata	43,44

Sumber: data diolah

Dari tabel diatas kebutuhan fiskal Kabupaten Maluku Tenggara Barat berkisar antara 21,18 % - 87,58 % dengan rata-rata kebutuhan fiskal pada tahun 2008 -2014 adalah 43,44 %. Kebutuhan fiskal yang dari tahun ke tahun semakin meningkat memaksa pemerintah daerah bekerja keras guna meningkatkan sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli daerah nya guna memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya sendiri tanpa transfer dana dari pemerintah pusat.

Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Indeks kemampuan rutin suatu daerah mencerminkan seberapa besar kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai pengeluaran daerahnya sendiri. Untuk mengukur indeks kemampuan rutin suatu daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan total pendapatan asli daerah dengan total belanja.Semakin baik tingkat indeks kemampuan rutin maka semakin kecil pula tingkat ketergantungan fiskal suatu daerah. Sebaliknya apabila tingkat indeks kemampuan rutinnya kurang maka tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi.

Berikut ini disajikan data indeks kemampuan rutin Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2008 - 2014, yaitu.

Tabel 7.
Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 2006 - 2012
(dalam persen)

Tahun	IKR	Kemampuan Keuangan Daerah
2008	5,44	Sangat Kurang
2009	4,01	Sangat Kurang
2010	4,88	Sangat Kurang
2011	3,29	Sangat Kurang
2012	5,24	Sangat Kurang
2013	4,44	Sangat Kurang

2014	4,11	Sangat Kurang
Rata-rata	4,49	Sangat Kurang

Sumber: data diolah

Dari tabel 7, menunjukkan bahwa indeks kemampuan rutin Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari tahun ke tahun selama periode penelitian masih *sangat kurang*. Indeks kemampuan rutin daerah sejak 2008 - 2014 berkisar antara 3,29 % - 5,44 % dengan rata-rata 4,49 %. Rendahnya indeks kemampuan rutin disebabkan karena pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi satu-satunya sumber pembiayaan belanja daerah masih sangat rendah. Untuk menutup celah antara perbandingan jumlah kebutuhan fiskal dan indeks kemampuan rutin dan memenuhi kebutuhan fiskal maka diperlukan transfer dari pemerintah pusat.

Ketergantungan Fiskal

Untuk menghitung tingkat ketergantungan fiskal pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah maka dapat diketahui dengan cara membandingkan total dana perimbangan terhadap total penerimaan daerah. Semakin rendah ketergantungan fiskal maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal.

Tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.
Ketergantungan Fiskal Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 2008 - 2014
(dalam persen)

Tahun	Ketergantungan	Tingkat Ketergantungan
2008	85,21	Tinggi
2009	95,81	Tinggi
2010	88,90	Tinggi
2011	92,04	Tinggi
2012	88,89	Tinggi
2013	76,39	Tinggi
2014	78,79	Tinggi
Rerata	86,58	Tinggi

Sumber: data diolah

Dari Tabel 8, di atas terlihat jelas bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap transfer pemerintah pusat dari tahun ke tahun masih sangat tinggi yaitu berkisar antara 76,39% - 95,81% dengan rata-rata per tahunnya sebesar 86,58%. Tingginya transfer pemerintah pusat ke daerah dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat selama era otonomi daerah ini masih *sangat tinggi*. Hal ini disebabkan karena sumber pembiayaan fiskal daerah yang dimaksud dalam hal ini

adalah pendapatan asli daerah belum mampu membiayai belanja daerah sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai segala pengeluaran atau belanja daerah demi melancarkan pembangunan daerah tersebut.

Selain itu, tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terlihat jelas pada tabel diatas bahwa jumlah dana perimbangan lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang sangat tinggi mencerminkan bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kurang berhasil dalam melaksanakan otonomi di daerahnya. Karena tujuan otonomi daerah adalah memandirikan daerah dalam membiayai sendiri pengeluaran daerah dalam hal ini urusan pemerintahannya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Pola Hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Apabila dilihat dari derajat kemandirian fiskal atau derajat desentralisasi fiskalnya yang rata-rata per tahunnya sebesar 3,71% dan indeks kemampuan rutinnya yang rata-rata per tahunnya adalah 4,49 % , maka menurut Thoha (1991) dan Reksohadiprodjo (1999), hubungan antara pemerintah pusat dan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat diklasifikasikan memiliki *Pola hubungan instruktif*. Artinya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara lebih banyak mendapatkan pengarah dan petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandirian yang dimiliki oleh daerah tersebut *sangat kurang*.

Hal ini menggambarkan dan menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kurang berhasil menjalankan otonomi di daerahnya sendiri. Karena kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan pada kenyataannya tingkat kemampuan keuangan Kabupaten Maluku Tenggara **sangat rendah/sangat kurang**.

V. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan sebagai berikut

1. Pelaksanaan otonomi daerah belum berhasil memberikan kontribusi yang baik/positif terhadap perkembangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2008 -

2014. Hal ini terlihat jelas dari sangat kurang/sangat rendahnya derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mencerminkan tingkat kemampuan atau tingkat kemandirian fiskal daerah yang hanya berkisar antara 2,66 % - 6,97% dengan rata - rata per tahun 3,71 %

2. Tingkat kemandirian fiskal daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat selama pelaksanaan otonomi daerah dalam membiayai pengeluaran pembangunan daerahnya masih sangat rendah yang tercermin dalam indeks kemampuan rutin yang hanya berkisar antara 3,29 % - 5,44 % dengan rata - rata 4,49 % per tahun.
3. Tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap transfer dana dari pemerintah pusat selama berlangsungnya otonomi daerah sangat tinggi yaitu berkisar antara 76,39% - 95,81% dengan rata -rata per tahunnya sebesar 86,69 %..

b) Saran

1. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat seharusnya lebih baik lagi dalam menggali dan mengelola sumber - sumber pendapatan asli daerah terutama pajak dan retribusi terutama dalam pengelolaan sektor pariwisata dan sektor perikanan yang menjadi sektor unggulan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat seharusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kucuran dana dan kinerja dinas -dinas agar tidak terjadi penyelewengan dana (Korupsi) sehingga dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan segala bidang.
3. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat lebih baik dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan peraturan daerah mengenai keuangan daerah terutama dalam mengatur pembelanjaan daerahnya.

REFERENSI

Halim, Abdul (2001) *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, UPP UMP YKPN.

Halim, Abdul, (2001) *Akuntansi Sektor Public "Akuntansi Keuangan Daerah"*, Salamba Empat, Jakarta.

Insukirno, dkk, (1994), "Peranan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah", Laporan Penelitian,

- FE, UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo.** (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta
- Mudrajad Kuncoro.** (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi Perencanaan, Strategi Dan Peluang*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Nadeak, Ruslina.** (2003). *“Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah”*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, FE, Universitas Sanata Dharma.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006** Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004** Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan pemerintah daerah*.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009** Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
- Widjaja, H.A.W.** 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*; Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Widjaja, H.A.W.** 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*; Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Yuliati.** 2004. *Analisa Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah (Kasus Kabupaten Malang)*; Penerbit (UPP) AMP YNPN Yogyakarta.